



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

TA. 2025

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Renstra BPBD menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja BPBD pada periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra BPBD Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah dan Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana dengan indikator Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana dan 1 (satu) sasaran pendukung yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, 07 Juli 2025

KEPALA PELAKSANA,



dr. APRIL, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670707 200012 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

VISI

"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"

MISI

MISI Ke- 3 RPJMD

"Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas"

MISI Ke- 4 RPJMD

"Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik"

NOTOFIKASI

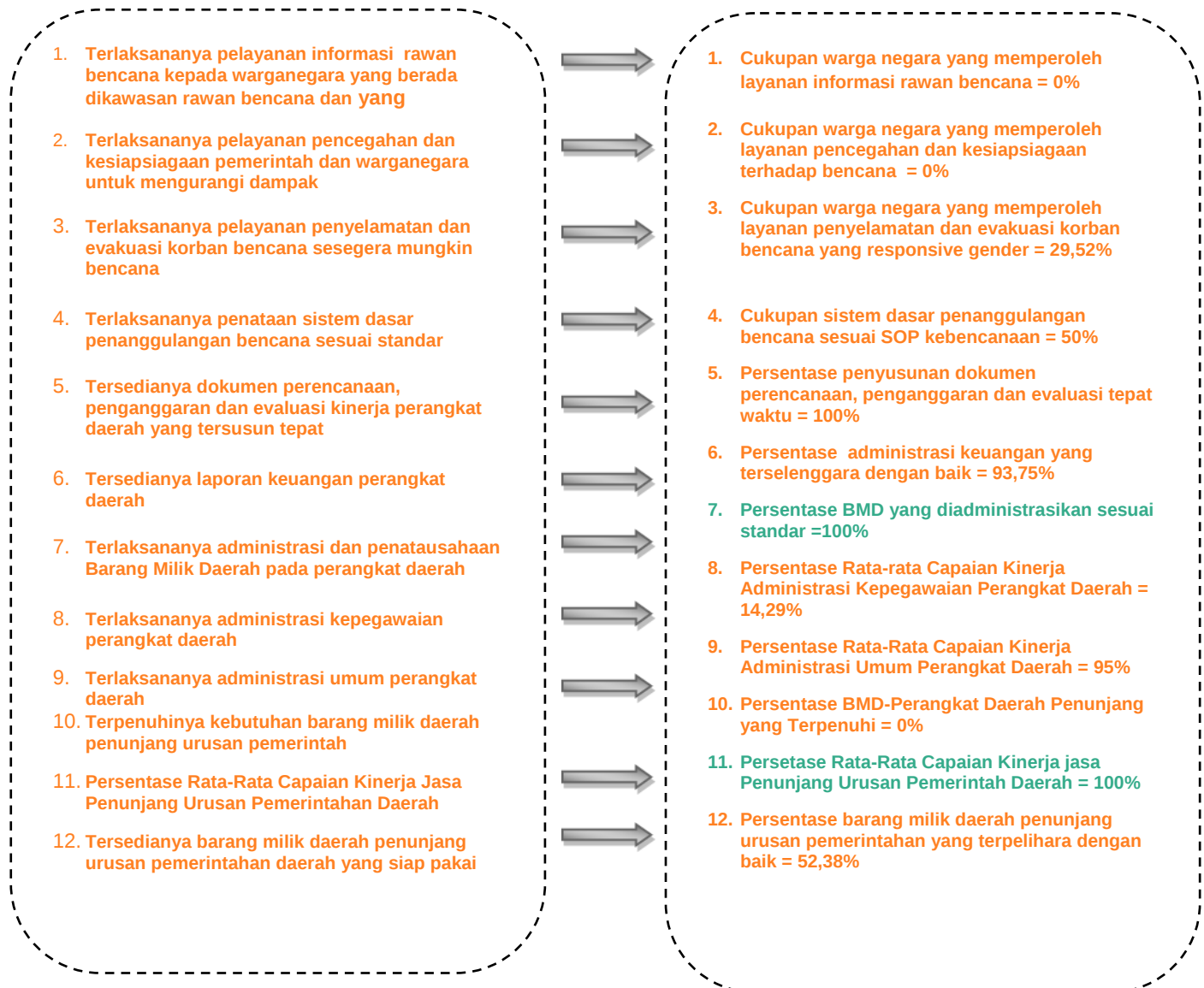
Tercapai

Tidak Tercapai

- I. Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana
- II. Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana
- III. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 - a. Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana
 - b. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana
 - c. Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana
 - d. Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai



1. Indeks Ketahanan Daerah IKD) = 0,65 (98,48)
2. Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana = 32,73%
3. NILAI AKIP Perangkat Daerah = 78,55 (BB) Baseline LHE Triwulan I Tahun 2025
 - a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 58,67%
 - b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 0%
 - c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender = 29,52%
 - d. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar = 69,42 %



DAFTAR ISI

	<i>hal.</i>
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>iv</i>
DAFTAR TABEL	<i>v</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>vii</i>
DAFTAR GRAFIK	<i>viii</i>
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi	4
1.4 Isu Strategis/Permasalahan	5
1.5 Sistematika Laporan	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Target Kinerja tahun 2021-2026	8
1. Visi dan Misi	9
2. Indikator Kinerja Sasaran	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	12
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Analis Capaian Kinerja	16
 BAB IV PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

hal.

Tabel 1	Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.....	11
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	12
Tabel 3	Program dan Pagu Anggaran Tahun 2025	13
Tabel 4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	15
Tabel 5	Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....	16
Tabel 6	Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Triwulan I Tahun 2025.....	22
Tabel 7	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I & II tahun 2025	23
Tabel 8	Perbandingan Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)	24
Tabel 9	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 24 Kab/Kota	25
Tabel 10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2025	30
Tabel 11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel 12	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I & II TA. 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	35
Tabel 13	Perbandingan Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah	36
Tabel 14	Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	38
Tabel 15	Alokasi Anggaran Bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	38
Tabel 16	Kendala Permasalahan dan Solusi SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	39
Tabel 17	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	51
Tabel 18	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	51
Tabel 19	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	54
Tabel 20	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	56
Tabel 21	Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun sebelumnya	57
Tabel 22	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)	58
Tabel 23	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	60
Tabel 24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
Tabel 25	Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung.....	62

DAFTAR GRAFIK

	<i>hal.</i>
Grafik 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ...	2
Grafik 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.....	2
Grafik 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1, Triwulan II Tahun 2025.....	17
Grafik 4 Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur s.d Triwulan II Tahun 2025	22
Grafik 5 Trend Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur 2020 s.d 2024	27
Grafik 6 Trend Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur 2018 s.d 2024	28
Grafik 7 Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana s.d Triwulan II TA. 2025.	34
Grafik 8 Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana Triwulan II Tahun 2025.....	43
Grafik 9 Capaian Kinerja Sasaran 3 s.d Triwulan II Tahun 2025	56
Grafik 10 Perbandingan Realisasi Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2025	68

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas* : membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah,
- Fungsi* : - Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

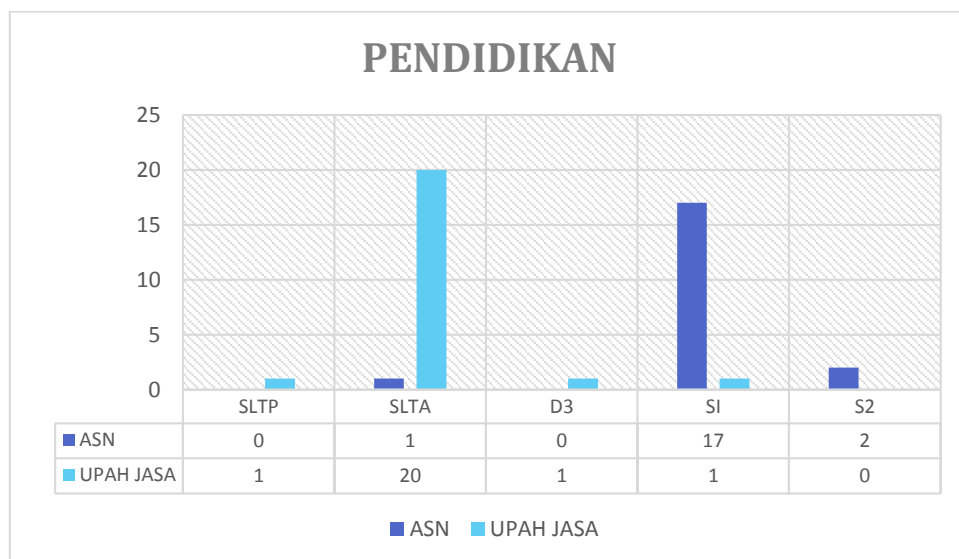
1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021.

Sumber Daya Manusia (SDM)

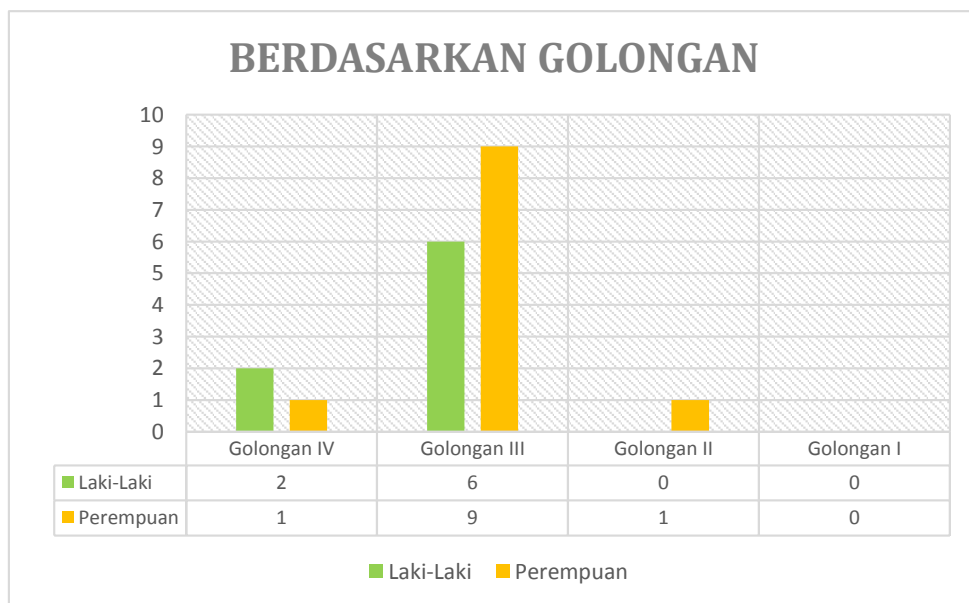
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 38 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 14 orang, PPPK 1 org dan Tenaga Upah Jasa 23 orang (Tenaga Administrasi 1 orang, Cleaning Service 1 orang, Sopir 1 orang dan Tim Reaksi Cepat 21 orang). Struktur tingkat pendidikan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :



Grafik. 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



Grafik. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan **Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana** (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan **Satuan Pelaksana Penanganan Bencana** (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Oleh karena hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang tentang penanggulangan bencana yang dituangkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. UU ini juga mengatur keterlibatan pihak swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang atau Peraturan ini dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang ini dimulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses pemulihan pasca bencana diatur di dalamnya. BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko serta penanganan korban. Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. BPBD Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas berbagai bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Dalam penanganan bencana dibutuhkan kesiagaan dan kecepatan seluruh unsur aparat dari berbagai instansi tanpa terkecuali. Sehingga ketika bencana tiba sudah tidak perlu birokrasi administrasi, koordinasi dan himbauan lagi. Akan tetapi yang terpenting adalah aparat akan bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi hal itulah yang perlu dibenahi dari sekarang dan itu menjadi tugas BPBD yang bukan hanya sekedar menanggulangi saat terjadi bencana namun juga melakukan koordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana, sampai pasca bencana.

1.4 PERMASALAHAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 telah diatur tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan II TA. 2025 terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan bencana;
2. Belum optimalnya pengolahan data lingkup bidang
3. Adanya penyesuaian penggunaan aplikasi Inaproc Versi.6 pada proses pengadaan barjas
4. Terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangan dan kinerjanya yang belum maksimal karena sifatnya disediakan
5. Pelaksanaan kegiatan tidak mengacu kepada ketersediaan anggaran kas dan rencana aksi
6. Keterbatasan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana
7. Keterlambatan proses penyelesaian administrasi keuangan

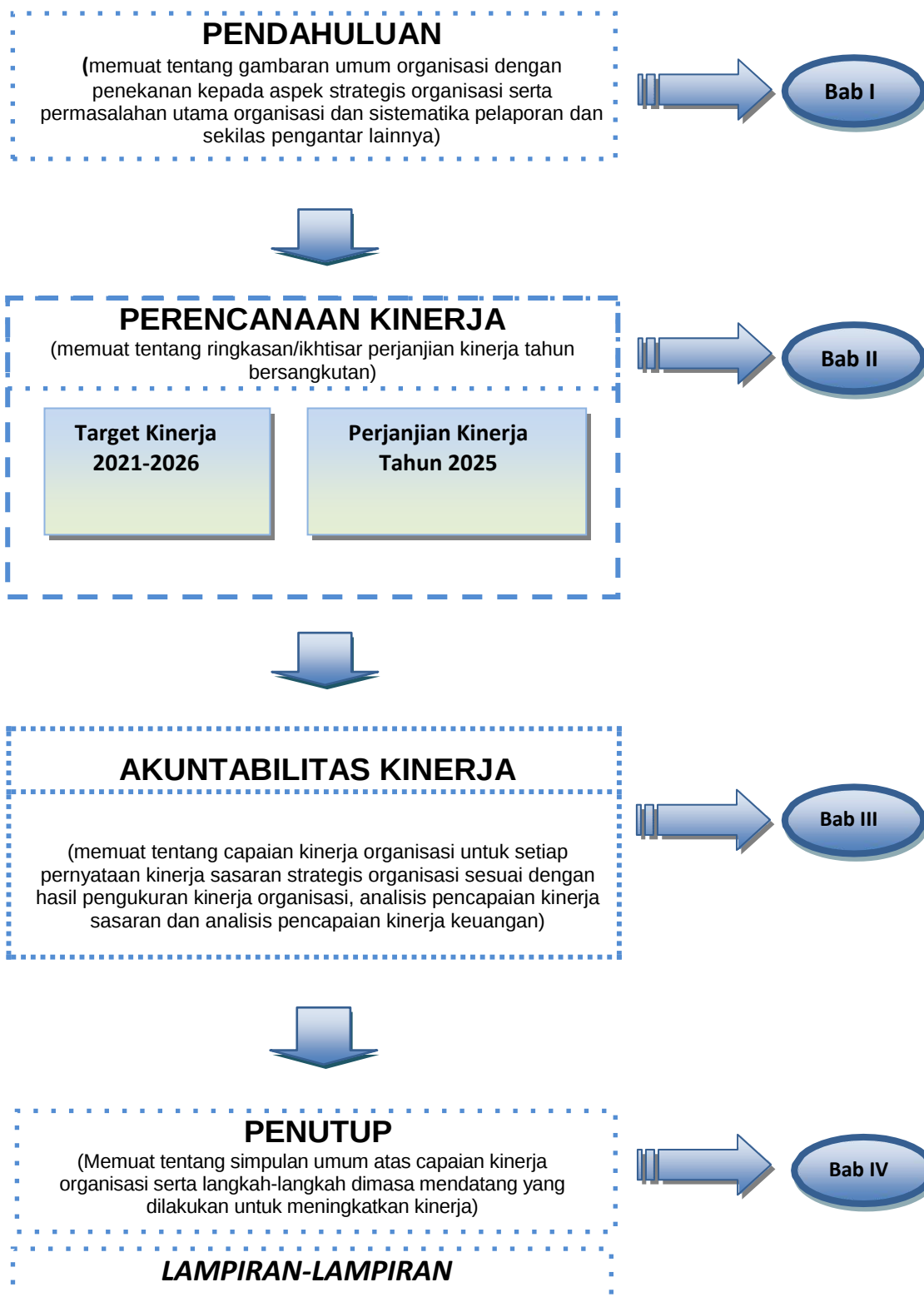
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Triwulanan ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja BPBD Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :

Referensi Bab



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk BPBD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Program pada Renstra BPBD periode 2021-2026 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan Program Nasional yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana dan disesuaikan juga dengan Program Prioritas (KP1) Kepala Daerah. Berdasarkan Renstra BPBD 2021-2026, mencakup 2 (dua) sasaran utama yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana dan Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2021-2026

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya BPBD dalam mewujudkan peran BPBP sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran BPBD dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021-2026. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2026 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

1 Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan

2 Pernyataan Misi

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur yaitu

MISI Ke- 3 RPJMD

"Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas"

Sasaran 7 RPJMD

MISI Ke- 4 RPJMD

"Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik"

Sasaran 8 RPJMD

"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan"

3. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh BPBD Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
Program dan Pagu Anggaran Tahun 2025

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.398.521.550,-	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	9.942.600.550,-	APBD
JUMLAH		13.341.122.100,-	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun

Tabel. 5
Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II TAHUN 2025	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,66 %	0,65 %	98,48	●
2.	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100	32,73	32,73	●
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,31	78,55	94,29	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

diverifikasi akhir oleh BNPB pada Bulan Desember 2025. Adapun hasilnya akan dirilis oleh BNPB melalui BUKU IRBI Tahun 2025 yang diterbitkan pada Awal Tahun 2025.

Capaian target tersebut diperoleh dari penginputan Tools 71 Indikator berdasarkan baseline data 2018-2024 yang dimutakhirkan setiap tahun, dan data tersebut bersumber dari OPD terkait seperti Bapelitbangda, Dinas PU & PR, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, DLH, Satpol PP, Dinas DAMKAR & Penyelamatan, TNI/POLRI dsb.

Penginputan hasil penilaian IKD dilakukan melalui inaRISK yaitu suatu platform yang digunakan untuk menilai kapasitas daerah secara mandiri. Hasil IKD nantinya tersimpan dalam server dan dapat diakses kembali oleh masing-masing daerah sehingga ini memudahkan proses pengarsipan dan pemutakhiran nilai IKD.

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. **INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)** merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. **IKD** aspek penting: merupakan komponen pada **kajian kapasitas** di dalam KRB **data input** dalam **perhitungan IRBI**. Penilaian IKD dilakukan dengan mekanisme 'pemutakhiran' bukan pengisian dari awal. Hasil penilaian akan diverifikasi oleh Provinsi dan BNPB, sehingga nilai bisa berubah. Nilai IKD yang baik adalah yang selalu meningkat, sehingga baseline yang rendah pun tidak masalah

Salah satu strategi dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana adalah peningkatan kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan propinsi.

Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Adapun hasil dari penilaian indeks kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Penguatan kelembagaan dan kebijakan, yaitu :
 - Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
 - Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2021 tentang SOTK BPBD
 - Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Luwu Timur 2011-2031
 - Rencana Detail Tata Ruang 2015-2025
 - Rencana Detail Tata Ruang Wotu, Malili, Wasuponda, Towuti, Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur
 - Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup
 - Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang bangunan Gedung
 - Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
 - Perbup BTT Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga
 - Perbup Nomor 34 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
 - SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 094/Dinkes/115/XI/2022 tentang Klaster Kesehatan dalam penanggulangan bencana
 - SK Bupati Luwu Timur Nomor 180/VII/Tahun 2018 tentang SOP Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, yaitu :
 - Dokumen Kajian Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
 - Peta Bahaya/Peta Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
 - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur
3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, yaitu :
 - PUSDALOPS BPBD
 - Pelatihan Penanggulangan Bencana setiap tahun
 - Gladi Penanggulangan Bencana setiap tahun
 - Pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana setiap tahun

- Penyimpanan/Gudang Logistik BPBD
 - Pemeliharaan peralatan dan suplay logistik secara periodik
 - Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana, yaitu :
- Penataan Ruang berbasis PRB
 - Pembentukan Desa Tangguh Bencana
 - Rumah Sakit terakreditasi (RS. I Lagaligo dan RS. Primaya Hospitasl Inco Soroako)
 - Puskesmas terakreditasi 17 dari 18 Puskesmas
 - Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Luwu Timur
 - Pembentukan Forum Risiko Bencana Tingkat Kabupaten
 - Forum Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Desa
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, yaitu :
- Rehabilitasi tanggul sungai
 - Normalisasi/Restorasi sungai
 - Pembangunan Bendung Sungai
 - Bangunan penahan gelombang (Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta)
 - Bangunan Perkuatan Tebing Sungai
 - Pembangunan Embung
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yaitu :
- Dokumen Rencana Kontigensi Banjir
 - Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi
 - Sistem Peringatan Dini Banjir di Sungai Kalaena (Sirine Banjir dan Sensor TMA Sungai)
 - EWS INA Tews (Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi yang Berpotensi Tsunami)
 - Pelaksanaan Simulasi, Sosialisasi, Pelatihan, Gladi kesiapsiagaan
 - Sosialisasi ke Masyarakat oleh TNI
 - Pemasangan Rambu-Rambu dan Papan Himbauan Peringatan Bencana
 - RTD PT. Vale Indonesia mengenai kegagalan Bendungan
 - Penentuan Status Darurat Bencana
 - Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
 - Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana

- Pengerahan Tim SAR/BASARNAS
 - Pengerahan Bantuan Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Penghentian Status Darurat Bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana, yaitu :
- Perbaikan rumah penduduk (pasca bencana)
 - Bantuan Keuangan untuk korban bencana.

Mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah terkait kebencanaan yaitu Indeks Risiko Bencana, maka BPBD beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk menurunkan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur melalui peningkatan Kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah. Hasil dari penilaian IKD akan berpengaruh terhadap penurunan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur. Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 adalah 133,38 dari target 150, dengan persentase capaian 112,46%.

Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tersebut mengalami penurunan karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. ***“Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Risiko Bencana akan menurun”***. IKD dan IRBI menjadi RAPOR bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana. ***Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berinvestasi dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Luwu Timur. Pengukuran IRB dan IKD merupakan ukuran keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.***

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan sebelumnya

Tabel. 7
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I & II Tahun 2025

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana						Target Tahun 2025
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan I Tahun 2025			Triwulan II Tahun 2025			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,66	0,65	98,48 %	0,66	0,65	98,48 %	0,66 (sedang)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa capaian Triwulan II tahun 2025 sama dengan capaian Triwulan sebelumnya, realisasi yang digunakan masih menggunakan baseline tahun 2024 karena Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dilakukan sekali setahun. FGD untuk Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) direncanakan pada Triwulan IV TA. 2025 sesuai dengan Timeline Penilaian IKD. Adapun capaian sampai dengan Triwulan II TA. 2025, sudah melebihi dari target yang direncanakan didalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra), telah melampaui target yang direncanakan. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai IKD melalui FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah setiap tahunnya, sehingga 7 prioritas dengan 71 indikator dapat dipenuhi secara bertahap, yang pada akhirnya dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada Triwulan II Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut Ini :

- Tersedianya Data Base (Baseline 2018-2024) berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Telah dilakukan pemutakhiran data IKD setiap tahun oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur melalui pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan melibatkan OPD terkait, Instansi Vertikal dan Dunia Usaha.
- Terdapat beberapa rekomendasi pada penilaian IKD tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti seperti penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi, PUSDALOPS BPBD, Sistem Peringatan Dini Banjir (EWS), RDTR yang telah berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan beberapa rencana penyusunan dokumen kebencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra BPBD 2021-2026, Penyusunan Dokumen KRB, Dokumen RPB dsb.
- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah karena telah menetapkan Mitigasi Bencana sebagai program prioritas kepala daerah dan dukungan penganggaran untuk kegiatan Mitigasi Bencana di seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK).

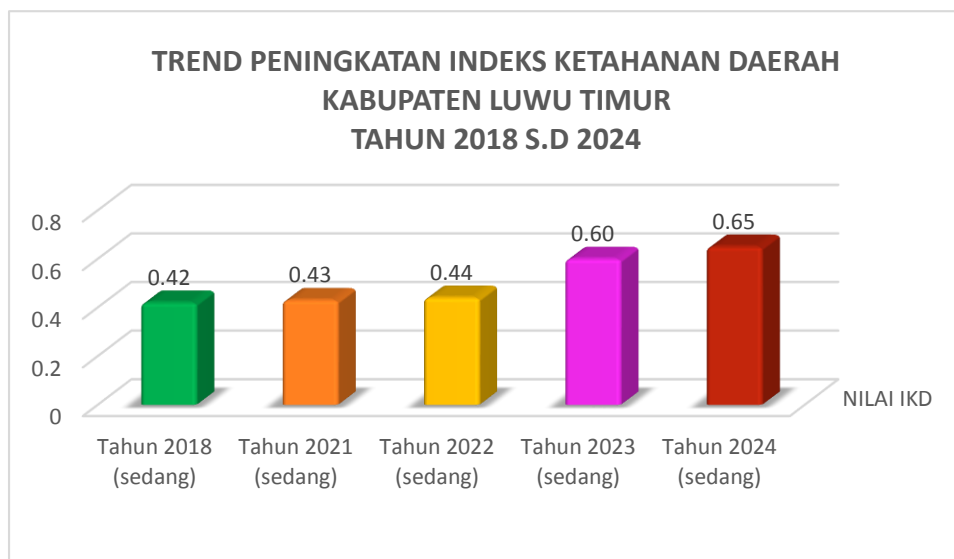
❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di BPBD
- Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
- Belum meratanya pemahaman terkait IRB dan IKD di beberapa stakeholder
- Telah banyak upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan namun belum terpetakan dengan baik
- Belum maksimalnya partisipasi OPD terkait pada pelaksanaan FGD Penilaian IKD.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :



Grafik 6
Trend Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur 2018 s.d 2024

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis BPBD, terdapat beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Terkait kebutuhan logistik & peralatan penanggulangan bencana, pada tahun 2025, BNPB memfasilitasi logistik korban bencana untuk BPBD Kab. Luwu Timur, daftar bantuan logistik yaitu : Makanan siap saji 50 paket, paket Sembako 100 paket (Beras 5 kg biskuit 4 bks, indomie 5 bks, corned beef 1 klg, sarden besar 1 lg, gula l bks, susu bubuk 1 bks), selimut 100 Lbr, Gygienne Kit 50 paket (**Dewasa** : Pembalut, pampers, sabun mandi, sikat gigi, shampoo, pasta gigi, kapas telinga, deodorant, gunting kuku, sabun cuci piring, detergent, handuk dewasa, handuk kecil, tissue muka, tissue basah, lotion nyamuk, pembersih tangan, kain pel gerah, lap karet, plastik sampah, stiker; **Bayi/Anak-Anak** : minyak telon, sabun bayi, shampoo bayi, sikat gigi, bedak bayi, tissue bayi, pampers sachet, handuk bayi, selimut bayi, perlak bayi, tas kancing tarik), Selimut 100 lbr, Matras 100 lbr, Tenda Pengungsi 2 set, Tenda Keluarga 10 unit, Pompa Alkon 1 unit.
- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk korban bencana seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari

BPBD, juga disediakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam bentuk Cadangan pangan serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Dalam pencapaian target program prioritas (KP 1) Pemerintah Daerah yaitu MITIGASI BENCANA, terdapat pelaksanaan program/kegiatan di Desa melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2025 ataupun menggunakan Dana Desa yang dilaksanakan oleh beberapa desa di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan atau peringatan dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat melihat langsung informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbauan peringatan dini tersebut. Selain itu penyebaran informasi juga dilakukan melalui Media Sosial yaitu FB, IG & Twitter yaitu [Pusdalops Bpbd Lutim](#).
- Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 38 orang yang terdiri dari 14 orang PNS, PPPK 1 org, 2 orang Upah Jasa, dan 21 orang Tim Reaksi Cepat (TRC). Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, BASARNAS, Tim SAR, TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas PU&PR, Dinas Perikanan, Dinas Sosial P3A, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, BASARNAS dsb.

- Terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas PU & PR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada. Selain itu terdapat Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana dari BNPB melalui Kementerian Keuangan dengan Besaran Anggaran Rp 8.587.571.000,- untuk Rekonstruksi Tanggul Banjir Sungai Desa Lauwo Kec. Burau dan Rekonstruksi Bangunan Pengaman Jembatan Desa Kawata Kec. Wasuponda.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,66	0,65	98,48%	5.792.714.730,-	337.869.850,-	5,83%
Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%	32,73%	32,73%			
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	58,67%	58,67%	56.130.200,-	4.807.500,-	8,56%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	0%	0%	191.694.500,-	9.435.000,-	4,92%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan	100%	29,52%	29,52%	632.571.230,-	318.947.350,-	50,42%

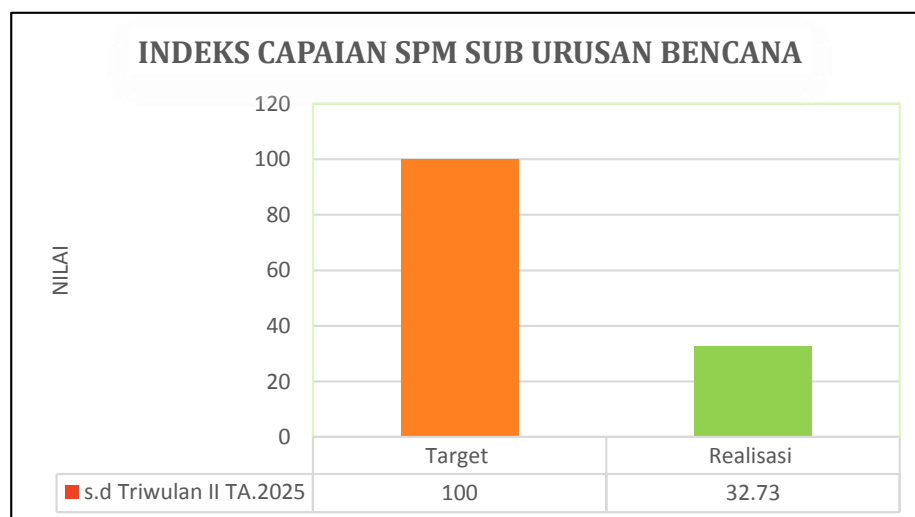
gotong royong, kesetiakawanan dan kederawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bukan hanya melekat pada BPBD saja tetapi didukung oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas PU&PR, Dinsos P3A, Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, BKAD, Bapelitbangda, BKPSDM, Dinas PMD, DPRD, TNI/POLRI, Instansi Vertikal, Dunia Usaha, Media dan Masyarakat. Dan dalam Upaya pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana, sangat dibutuhkan kolaborasi Pentahelik kebencanaan. Dan sebagai OPD pengampuh untuk pencapaian Indikator Kepala Daerah yaitu Penurunan Indeks Risiko Bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), maka BPBD sebagai leading sektor yang bertugas untuk melaksanakan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan melibatkan seluruh OPD terkait dalam Forum Group Discussion (FGD) untuk mengetahui seberapa besar kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Sehingga nantinya akan diperoleh data dan informasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur secara menyeluruh. Dan salah satu program yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Luwu Timur dalam pencapaian sasaran yaitu Program Penanggulangan Bencana, dan melalui program tersebut, beberapa indikator dalam penilaian Ketangguhan daerah dapat dipenuhi. Seperti Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Kontingenji, Pengintegrasian dokumen KRB kedalam RTRW, Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten, penyediaan logistik korban bencana, penanganan darurat bencana, pemulihan pasca bencana, diklat kebencanaan, pembentukan Desa Tangguh Bencana, Sekolah Aman Bencana, Sosialisasi Rawan Bencana, Penyusunan Regulasi kebencanaan dsb.

Pada tahun 2025, Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana pada BPBD Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan bencana



Grafik. 7

Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana s.d Triwulan II TA. 2025

Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2025

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : ***“Pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)”***

Indeks .Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Perhitungan indeks capaian SPM dilakukan melalui penginputan pada aplikasi SPM dengan **link <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>**.

Target Indikator sasaran 2 pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100% dan realisasi Triwulan II Tahun 2025 adalah 32,73% dengan persentase capaian kinerja 32,73%. Realisasi yang tidak mencapai target disebabkan karena salah satu layanan SPM yaitu Layanan Informasi Rawan Bencana yang realisasinya < 100%. Sedangkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana masih 0% dan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana terealisasi 29,52%.

himbauan peringatan dini bencana di setiap kecamatan serta sosialisasi secara tatap muka langsung melalui pelaksanaan Sosialisasi KIE Rawan Bencana di 11 kecamatan. Sedangkan untuk layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan cara memaksimalkan pelaksanaan kegiatan serta anggaran yang terdapat pada beberapa OPD terkait misalnya Pelaksanaan kegiatan kebencanaan melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan untuk Mitigasi Bencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dunia usaha dan Masyarakat. Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana BMKG untuk deteksi Gempa Bumi Lokal dan yang bersumber dari luar wilayah Luwu Timur. Begitu juga untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dengan memaksimalkan koordinasi dengan BASARNAS, pengerahan Tim Relawan, dunia usaha dan masyarakat dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4. Perbandingan dengan Target Nasional (SPM Penanggulangan Bencana)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun **Target nasional** dari ketiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah **100% setiap tahun**. Olehnya itu perbandingan antara target nasional dengan capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

	Bencana				
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	58.142.400,-	-
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	153.550.000,-	-
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	52.877.300,-	-
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	38.144.500,-	-
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	27.835.000,-	-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	1.212.052.450,-	-
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	1.116.299.050,-	-
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	36.070.000,-	-
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	45.795.300,-	-
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	-	6.464.200,-	-
		Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	-	7.423.900,-	-

Tabel. 16
Kendala, Permasalahan dan Solusi
SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana, (2). Terdapat Papan Hibauan Informasi Bencana di 4 Kecamatan yang belum terpasang baliho informasi bencana	(1).Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Hibauan Peringatan Dini dan Media Sosial, (2).Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyebarluasan informasi rawan bencana, (3).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.

2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana	(1). Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan, (2). Memaksimalkan program dan kegiatan pada OPD terkait yang menyediakan anggaran untuk Mitigasi Bencana struktural dan Non Struktural
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(1). Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, (2). Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, (3). Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis	(1). Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG, (2). Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan, (3). Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana, (4). Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

❖ Analisis Penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu <100% yaitu :

- Pemahaman terkait pentingnya informasi kebencanaan belum merata di masyarakat
- Terbatasnya sarana dan prasarana penyebarluasan informasi kebencanaan
- Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan kebencanaan
- Belum maksimalnya pemahaman terkait konsep pelayanan dasar
- Keterlambatan pelaksanaan kegiatan (tidak sesuai rencana aksi)

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Kurangnya sosialisasi
- Minimnya kualitas SDM penanggulangan bencana
- Keterbatasan anggaran
- Terdapat beberapa media penyampaian informasi peringatan dini bencana yang mengalami kerusakan

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Memaksimalkan sosialisasi KIE rawan bencana melalui media sosial (FB, IG, WA) dan melalui papan informasi publik
- Memaksimalkan koordinasi lintas OPD terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian SPM di kabupaten misalnya dengan Dinas PMD terkait penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) untuk Mitigasi Bencana di desa, Dinas Sosial &P3A terkait penyediaan logistik untuk korban bencana, Dinas PUPR terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Mitigasi Bencana Struktural, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan terkait Cadangan pangan dsb.
- Pencapaian target semaksimal mungkin dengan mencermati capaian program/kegiatan lintas OPD yang berkontribusi dalam pencapaian SPM urusan bencana.
- Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui diklat/pelatihan dan simulasi
- Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai Rencana Aksi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis 2, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Adanya penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa untuk pelaksanaan Mitigasi Bencana di desa.
- Efisiensi anggaran logistik untuk korban bencana karena adanya supporting logistik dari BNPB dan BPBD Provinsi Sul-Sel dan OPD terkait seperti bantuan logistik dari Dinas Sosial & P3A, Cadangan Pangan dari Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan serta bantuan logistik dari dunia usaha dan Masyarakat.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

- Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi kebencanaan.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana BMKG dalam penyebarluasan informasi kebencanaan seperti alat deteksi gempa bumi lokal yang berada di 3 titik yaitu di Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Ussu Kec. Malili, Desa Kalpataru Kec. Tomoni dan Alat Ina TEWS untuk mendeteksi gempa yang berasal dari luar Kabupaten Luwu Timur yang ditempatkan di Kantor BPBD.

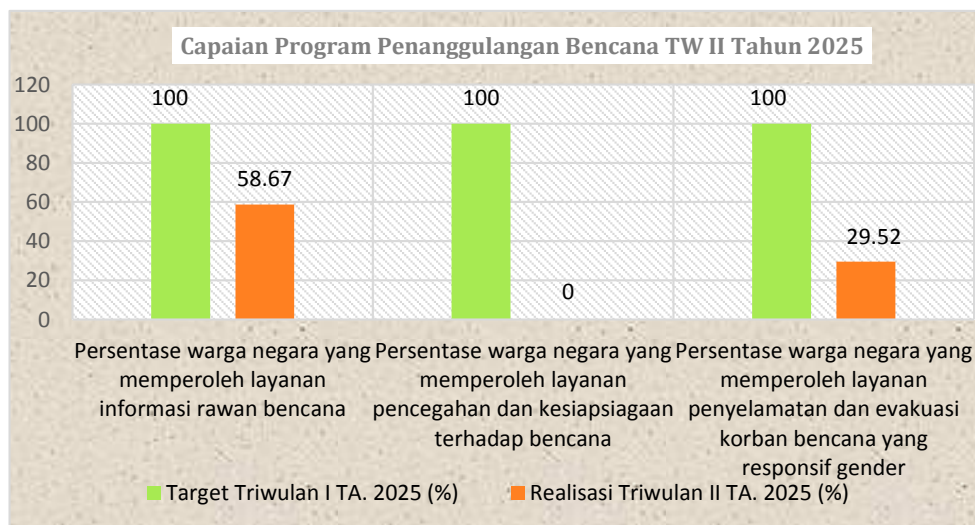
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

❖ Program Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi

Sasaran program adalah : (1) Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana, (2) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana, (3) Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana

Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana (outcome)



Grafik. 8

Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana Triwulan II Tahun 2025

❖ **Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2025 adalah :**

a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi : “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”.

$$= \frac{185.395}{316.000} \times 100$$

$$= 58,67\%$$

Target Triwulan II Tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 58,67% dengan persentase capaian kinerja 58,67%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Layanan Informasi kebencanaan melalui PUSDALOPS BPBD sebanyak 3.598 org, Penyampaian informasi kebencanaan melalui Papan himbauan informasi bencana dan rambu-rambu peringatan dini bencana yang ditempatkan di 7 kecamatan, dengan akumulasi jumlah masyarakat yang menerima layanan informasi sebesar 185.395 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 316.000 jiwa (database jumlah penduduk semester II Tahun 2024). Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 4 kecamatan yang papan himbauan informasi bencana belum

terpasang baliho kondisinya yang rusak dan buram, dan telah dianggarkan pada tahun 2025.

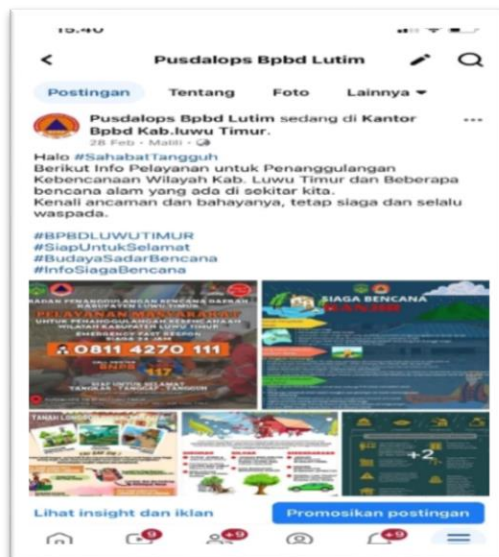
Dokumentasi Layanan Informasi Rawan Bencana



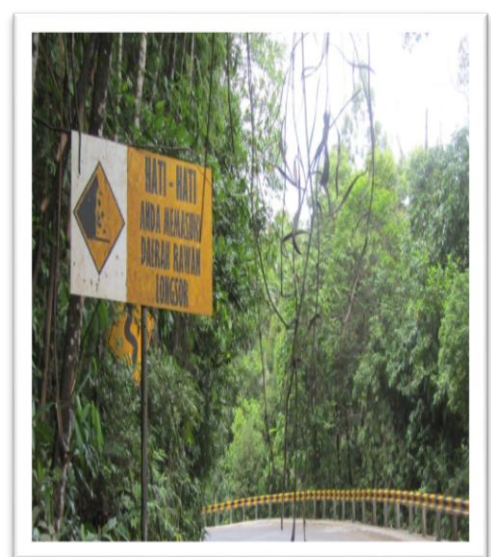
Papan Himbuan Peringatan Dini Bencana



Papan Himbuan Peringatan Dini Bencana



Media Sosial BPBD



Rambu-Rambu Peringatan Daerah Rawan

b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi : *“Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”.*

$$= \frac{0}{17.446} \times 100$$

$$= 0\%$$

Terkait indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berdasarkan anggaran yang dialokasikan di DPA-SKPD BPBD TA. 2025, berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan bahwa sub kegiatan terkait layanan pencegahan dan kesiapsiagaan direncanakan pelaksanaannya pada triwulan II, III & IV. Namun sub kegiatan yang direncanakan pada triwulan II TA. 2025 yaitu Pengembangan Kapasitas TRC Kab/Kota, tertunda pelaksanaannya karena menyesuaikan jadwal kepala OPD. Namun pada dasarnya dengan keberadaan EWS Gempa Bumi dan banjir yang ditempatkan di beberapa titik sudah mencakup layanan pencegahan dan kesiapsiagaan di Kabupaten Luwu Timur. Penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Atue Kec. Malili dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Kec. Malili serta Alat deteksi gempa bumi yang berpotensi tsunami yang ditempatkan di Kantor BPBD Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur, dan dapat diasumsikan bahwa seluruh warga negara yang ada di Kab. Luwu Timur yang berjumlah 316.000 jiwa (baseline data) memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.



Respon cepat penebangan pohon di Kec. Malili,
07 April 22025



Pembersihan Sungai Malili di Kec. Malili, 08 Mei
2025



Penyelamatan & Evakuasi Korban Banjir
Desa Sumber Alam Kec. Tomoni



Kunjungan ke lokasi Banjir Desa Non
Blok Kec. Kalaena



Kunjungan ke Lokasi pasca bencana angin kencang di Desa Harapan Kec. Malili





**Pencarian Orang Hilang di Desa Kasintuwu
Kec. Mangkutana**



**Orang Hilang di Desa Bone Pute Kec.
Burau telah ditemukan oleh Tim Gabungan
TRC BPBD, Damkar, Polri & Masy.**



**Penyelamatan & Evakuasi Korban Banjir di Desa
Rende-Rende Kec. Wasuponda, 01 April 22025**



**Penanganan Kebakaran Lahan di Desa Ussu
Kec. Malili 9 Juni 2025**



**Penyaluran Logistik Korban Bencana
Kebakaran di Desa Lampenai Kec. Wotu**



**Penyaluran Logistik korban cuaca ekstrim
di desa Nikel Kec.Nuha**

Pada tahun 2025, pencapaian SPM Sub Urusan Bencana pada Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap Korban bencana
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit

Adapun capaian kinerja Kegiatan/Sub kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target s.d TW II TA. 2025	Realisasi s.d TW II TA. 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,08%	0	0	0%

b.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	250 org	250 org	0 org	0%
-----------	---	---	--	---------	---------	-------	----

Tabel. 17
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel. 18
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2025	Target s.d TW II TA. 2025	Realisasi s.d TW II TA. 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	6	7
1.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5,5%	0%	0%	0%
a.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlatihnya aparaturnya dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	100 org	0 org	0 org	0%
b.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal	35 unit	35 unit	0 unit	0%

			sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)				
c.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	4 Desa	0 Desa	0 Desa	0%
d.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	50 org	50 org	0 org	0%
e.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	500 org	0 org	0 org	0%

	Bencana	bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	darurat bencana kabupaten/kota				
--	---------	---	-----------------------------------	--	--	--	--

8. KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana yaitu 32,73% diperoleh dari rumus perhitungan :

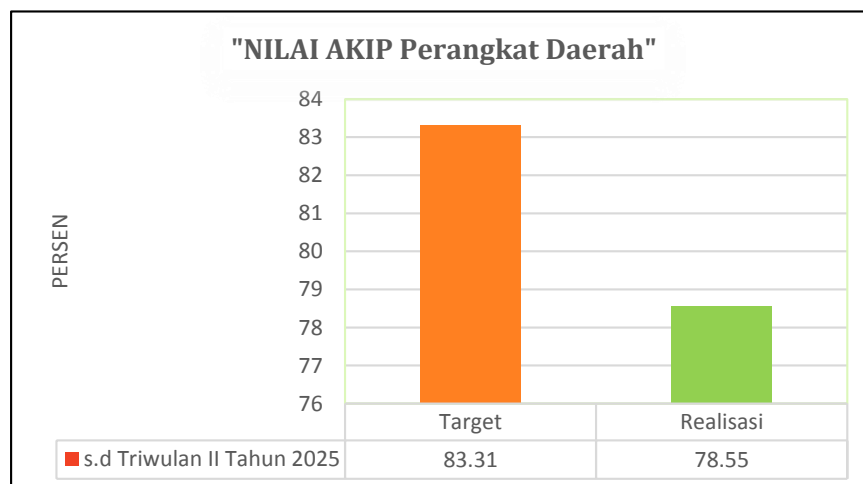
$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

$$= \frac{32,73}{100} \times 100$$

$$= 32,73\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur s.d Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : **Rp. 880.395.930,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 333.189.850** atau **37,85%**.

Sasaran 3 (Sasaran Pendukung) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Grafik. 9
Capaian Kinerja Sasaran 3 s.d Triwulan II Tahun 2025

NILAI AKIP Perangkat Daerah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel. 20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran III :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Notifikasi
Indikator Kinerja Sasaran	s.d Triwulan I Tahun 2025			
	Target	Realisasi	Capaian	
NILAI AKIP Perangkat Daerah	83,31	78,55	94,29	

Keterangan :  Mencapai/Melampaui Target ;  Belum Mencapai Target

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah **"NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat"**.

Target Indikator sasaran Tahun 2025 adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah 83,31(A), namun belum dapat dibandingkan dengan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2025 karena penilaiannya dilakukan di awal Tahun depan sehingga hanya dibandingkan dengan Realisasi Nilai AKIP Triwulanan Tahun 2025. Nilai AKIP berdasarkan LHE Inspektorat

- a. Melakukan Reviu kembali Dokumen Perencanaan (Renstra)
- b. Penetapan target kinerja mengacu kepada capaian dan realisasi tahun sebelumnya
- c. Melengkapi IKU dengan definisi operasional
- d. Meningkatkan kualitas LKJ dengan memperdalam analisis capaian dan disertai data dan bukti dukung yang relevan
- e. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja
- f. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
- g. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja
- h. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- i. Melakukan evaluasi program dan kegiatan
- j. Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website Instansi Pemerintah
- k. Menindaklanjuti rekomendasi LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 22
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)

Sasaran III :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Triwulan II Tahun 2025	realisasi sampai dengan tahun Tahun 2025		
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,55	78,55	80	98,19%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja sampai sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yaitu 78,55 (BB) belum mencapai target jangka menengah. Hal ini karena beberapa faktor yaitu masih terdapat ASN yang tidak melakukan penginputan SKP, belum menggunakan aplikasi dalam pengumpulan data, rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Namun nilai

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan perbaikan sehingga layak untuk digunakan Kembali.
- Terdapat harga satuan untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang bisa digunakan untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan kantor.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Keterbatasan jumlah ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dimaksimalkan dengan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan tenaga upah jasa TRC dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 23
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran III :	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	Capaian (%)	Alokasi Anggaran s.d Triwulan II TA. 2025	Realisasi Triwulan II TA. 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP Perangkat Daerah	83,31	78,55	94,29	2.320.854.437,-	1.222.114.713,-	52,66%

Catatan : Realisasi Triwulan II TA.2025 (Baseline Triwulan I TA. 2025)

Tabel. 24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran III	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP Perangkat Daerah	94,29	52,66%	47,34%

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 94,29% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 52,66%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 47,34%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan**. Target 100% dan realisasi 69,42% dengan capaian kinerja 69,42%, dan menyerap anggaran sebesar 52,66%. Capaian kinerja program tidak mencapai target karena terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya kinerjanya <100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program secara keseluruhan. Misalnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan yang realisasinya belum sesuai target, hal ini karena adanya beberapa jabatan struktural dan fungsional yang belum terisi ASN. Begitu juga dengan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi disesuaikan dengan surat pemanggilan peserta. Demikian halnya dengan sub kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan kantor yang realisasinya disesuaikan dengan kondisi kendaraan dan peralatan yang memerlukan perbaikan.

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 25
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target s.d TW II	Realisa s.d TW II	Capaian
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	69,42%	69,42%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	10 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan	Tersedianya laporan keuangan	Persentase Administrasi Keuangan	100%	100%	93,75%	93,75%

	Perangkat Daerah	perangkat daerah	Perangkat Daerah Tepat Waktu				
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	16 Org	16 Org	14 Org	87,50%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD n	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18 Lap	10 Lap	10 Lap	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4 Lap	2 Lap	2 Lap	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	100%	14,29%	14,29%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10 Org	7 Org	1 Org	14,29%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	95%	95%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100 %

		kantor	Disediakan (Paket)				
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20 Paket	20 Paket	14 Paket	70%
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3 Paket	3 Paket	3 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60 Dok	15 Dok	15 Dok	100%
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	100%	0%	0%
a.	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5 Unit	5 Unit	0 Unit	0%
b.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4 Unit	4 Unit	0 Unit	0%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasiny surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%

b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	52,38%	52,38%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14 Unit	14 Unit	9 Unit	64,29%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33 Unit	21 Unit	9 Unit	42,86%
c.	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%

Dokumentasi Kegiatan Penunjang SKPD



Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Money Internal OPD Triwulan I TA. 2025



Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Money Internal OPD Triwulan II TA. 2025

7. KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yaitu 99,98% diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

$$= \frac{78,55}{83,31} \times 100$$

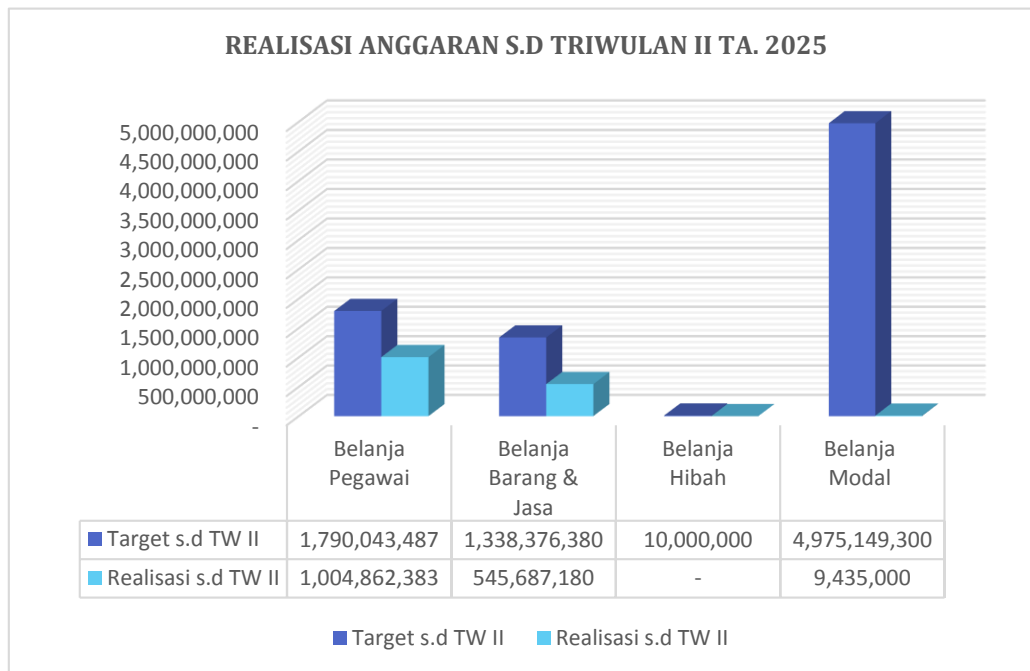
$$= 94,29\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur pada s.d Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : **Rp. 2.320.854.437,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.222.114.713,-** atau **52,66%**.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 adalah sebesar sebesar **Rp. 13.341.122.100,-** (*Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 2.596.606.110,-** belanja barang dan jasa **Rp. 2.329.775.690,-**, belanja hibah Rp 10.000.000 serta belanja modal **Rp 8.404.740.300,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program, 12 kegiatan serta 34 sub kegiatan. Sedangkan target dan realisasi anggaran pada s.d Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik. 10
Perbandingan Realisasi Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2025

Tabel. 26
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Target s.d Triwulan II TA. 2025 (Berdasarkan Anggaran Kas)	Realisasi Anggaran sd 30 Juni 2025		Selisih		Total Sisa Anggaran	
				(Rp)	%	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
					(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.341.122.100	8.113.569.167	1.559.984.563	19,23	6.553.584.604	80,77	11.781.137.537	88,31
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.398.521.550	2.320.854.437	1.222.114.713	52,66	1.098.739.724	47,34	2.176.406.837	64,04
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.907.700	28.107.700	3.750.000	13,34	24.357.700	86,66	29.157.700	88,60
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.907.700	28.107.700	3.750.000	13,34	24.357.700	86,66	29.157.700	88,60
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.152.800	-	-	-	-	-	4.152.800	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.014.200	2.639.200	1.623.550	61,52	1.015.650	38,48	2.390.650	59,55
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.829.400	42.544.700	500.000	1,18	42.044.700	98,82	71.329.400	99,30
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.651.708.210	1.790.986.237	1.016.562.383	56,76	774.423.854	43,24	1.635.145.827	61,66
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.596.606.110	1.759.923.487	1.004.862.383	57,10	755.061.104	42,90	1.591.743.727	61,30
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	55.102.100	31.062.750	11.700.000	37,67	19.362.750	62,33	43.402.100	78,77

3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.745.600	14.160.600	5.250.000	37,07	8.910.600	62,93	15.495.600	74,69
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.745.600	14.160.600	5.250.000	37,07	8.910.600	62,93	15.495.600	74,69
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.452.000	29.452.000	1.860.000	6,32	27.592.000	93,68	27.592.000	93,68
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.452.000	29.452.000	1.860.000	6,32	27.592.000	93,68	27.592.000	93,68
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.925.400	206.783.900	122.908.210	59,44	83.875.690	40,56	142.017.190	53,61
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.213.000	7.106.500	3.255.000	45,80	3.851.500	54,20	10.958.000	77,10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.240.000	15.620.000	8.877.000	56,83	6.743.000	43,17	22.363.000	71,58
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.150.000	30.575.000	2.175.000	7,11	28.400.000	92,89	31.975.000	93,63
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.440.000	3.720.000	3.350.000	90,05	370.000	9,95	4.090.000	54,97
	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.720.000	6.600.000	3.650.000	55,30	2.950.000	44,70	13.070.000	78,17
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.162.400	143.162.400	101.601.210	70,97	41.561.190	29,03	59.561.190	36,96
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.830.000	57.830.000	-	-	57.830.000	100	57.830.000	100
	Pengadaan Mebel	13.450.000	13.450.000	-	-	13.450.000	100	13.450.000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.380.000	44.380.000	-	-	44.380.000	100	44.380.000	100
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.796.240	50.600.100	33.221.070	65,65	17.379.030	34,35	52.575.170	61,28
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.417.700	3.917.700	500.000	12,76	3.417.700	87,24	3.917.700	88,68
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.818.540	33.902.400,00	24.431.070,00	72,06	9.471.330,00	27,94	31.387.470,00	56,23
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.560.000	12.780.000	8.290.000	64,87	4.490.000	35,13	17.270.000	67,57
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	175.160.000	97.750.000,00	36.439.500	37,28	61.310.500	62,72	138.720.500	79,20
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.000.000	64.700.000	27.407.500	42,36	37.292.500	57,64	99.592.500	78,42
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.210.000	18.050.000	4.040.000	22,38	14.010.000	77,62	24.170.000	85,68
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.950.000	15.000.000	4.992.000	33,28	10.008.000	66,72	14.958.000	74,98
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	9.942.600.550	5.792.714.730	337.869.850	5,83	5.454.844.880	94,17	9.604.730.700	96,60
9	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	56.130.200	56.130.200	4.807.500	8,56	51.322.700	91,44	51.322.700	91,44
	Sosialisasi, Komonikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	56.130.200	56.130.200	4.807.500	8,56	51.322.700	91,44	51.322.700	91,44
10	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	330.549.200	191.694.500	9.435.000	4,92	182.259.500	95,08	321.114.200	97,15
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	58.142.400	-	-	-	-	-	58.142.400	100

	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	153.550.000	153.550.000	9.435.000	6,14	144.115.000	93,86	144.115.000	93,86
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	52.877.300	-	-	-	-	-	52.877.300	100
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	38.144.500	38.144.500	-	-	38.144.500	100,00	38.144.500	100
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	27.835.000	-	-	-	-	-	27.835.000	100
11	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.212.052.450	632.571.230	318.947.350	50,42	313.623.880	49,58	893.105.100	73,69
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.116.299.050	563.309.300	308.505.750	54,77	254.803.550	45,23	807.793.300	72,36
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	36.070.000	27.716.750	3.708.000	13,38	24.008.750	86,62	32.362.000	89,72
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	45.795.300	32.473.580	6.733.600	20,74	25.739.980	79,26	39.061.700	85,30
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	7.423.900	5.217.400	-	-	5.217.400	100,00	7.423.900	100
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	6.464.200	3.854.200	-	-	3.854.200	100,00	6.464.200	100,00
12	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	8.343.868.700	4.912.318.800	4.680.000	0,10	4.907.638.800	99,90	8.339.188.700	99,94
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	8.343.868.700	4.912.318.800	4.680.000	0,10	4.907.638.800	99,90	8.339.188.700	99,94
	Jumlah	13.341.122.100	8.113.569.167	1.559.984.563	19,23	6.553.584.604	80,77	11.781.137.537	88,31

❖ **Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran Triwulan II TA. 2025**

Tabel.27
Permasalahan dan Solusi

KODE KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1								
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			-

1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu sebanyak 3 dokumen. Berdasarkan anggaran kas, output sub kegiatan direncanakan pada triwulan III TA. 2025 sebanyak 3 dokumen.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan II sebesar Rp 28.107.700- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.750.000 atau sebesar 13,34%. Realisasi yang masih rendah karena terdapat beberapa SPJ belanja E-catalog sebesar Rp. 2.272.392 yang belum di GU-kan. Sedangkan untuk anggaran perjalanan dinas, penggunaannya disesuaikan dengan surat/undangan kegiatan yang terkait.	Percepatan proses pengadaan belanja melalui e-catalog dan administrasi keuangan
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen, direncanakan pada Triwulan III TA. 2025.		
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Target output sub kegiatan sampai dengan triwulan II yaitu tersusunnya dokumen DPA-SKPD TA. 2025 dan DPA pergeseran II TA. 2025 sebanyak 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan II sebesar Rp 2.639.200,- dan realisasi keuangan s.d TW II sebesar Rp. 1.623.550 atau 61,52% dari target 100%. Terdapat sisa belanja sebesar Rp.62.500 dan sisa belanja cetak sebesar Rp. 953.150 yang tidak teralialisasi karena disesuaikan kebutuhan kantor	Percepatan proses pengadaan belanja melalui e-catalog dan administrasi keuangan
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sampai dengan triwulan II sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 100%. Dokumen yang disusun yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP, Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2024, Laporan Evaluasi TW I dan laporan RKPD TW I dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan II sebesar Rp 42.544.700,- Dan Realisasi keuangan s.d TW II sebesar Rp.500.00 atau 1.18% dari target 100%. Hal ini karena terdapat belanja E-Catalog sebesar Rp. 2.755.242 yang belum di GU-kan dan anggaran yang disediakan untuk kegiatan forum IKD yang tidak terealisasi. Sedangkan untuk anggaran perjalanan dinas, penggunaannya disesuaikan dengan surat/undangan kegiatan yang terkait.	Percepatan proses pengadaan belanja melalui e-catalog dan administrasi keuangan
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan sebanyak 16 org dan pada triwulan II terealisasi hanya 14 org sehingga capaian kinerja 87.5 %. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan fungsional penyetaraan yang belum terisi ASN	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan II sebesar Rp 1.790.986.237,- dan realisasi Rp 1.004.862.383,- atau sebesar 57,10%. dari target 100%. Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena masih terdapat jabatan yang belum terisi sehingga berpengaruh terhadap realisasi keuangan.	PPTK tetap mencermati perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN dan PPPK
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target sampai dengan triwulan II sebanyak 10 dokumen dan realisasi 5 dokumen yaitu Laporan Keuangan Tahun 2024 sebanyak 1 dok, Laporan Triwulan 1 dok, Laporan Bulanan Bendahara 3 dok, laporan Bulanan bendahara TW II sebanyak 3 dok , Laporan Triwulan II sebanyak 1 dokumen dan laporan semesteran 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan II sebesar Rp 31.062.750,-, dan Realisasi keuangan Rp. 11.700.000,- atau sebesar 37,67%. Realisasi keuangan yang masih rendah karena terdapat belanja E-Catalog sebesar Rp. 3.378.618 yang belum di Gu-kan. Untuk belanja jasa pelayanan umum (tenaga administrasi) tidak terealisasi karena telah beralih menjadi TRC	Percepatan proses pengadaan belanja melalui e-catalog dan administrasi keuangan
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD			

1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dan target sampai dengan triwulan II sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan II sebesar Rp 14.160.600,-Dan Realisasi sebesar Rp.5.250.000 atau sebesar 37,07%. Realisasi keuangan yang masih rendah karena terdapat belanja E-Catalog sebesar Rp. 1.440.336 yang belum di GU-kan. Sedangkan untuk anggaran perjalanan dinas, penggunaannya disesuaikan dengan surat/undangan kegiatan yang terkait.	Percepatan proses pengadaan belanja melalui e-catalog dan administrasi keuangan
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, target sampai dengan triwulan II sebanyak 7 orang, dan terealisasi sebanyak 1 orang atau sebesar 14,28%. Pelaksanaan bimtek berdasarkan undangan ataupun pemanggilan peserta diklat/bimtek.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan II sebesar Rp 29.452.000,- dan realisasi keuangan s.d TW II sebesar Rp.1.860.000 atau sebesar 6,32%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan undangan/pemanggilan peserta diklat atau bimtek	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator out put sub kegiatan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan sebanyak 8 jenis per triwulan . Dan realisasi triwulan II TA. 2025 Sebanyak 8 jenis atau 10 0%. Penyediaan komponen instalasi litrik disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	Dan disediakan anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 7.106.500,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp.3.255.000 atau sebesar 45,80%. Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	Agar PPTK tetap mencermati kebutuhan alat listrik untuk kebutuhan kantor
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target sebanyak 20 jenis setiap triwulan, dan untuk triwulan II terealisasi 1 jenis yaitu BBM operasional 1 jenis dengan persentase capaian kinerja 5%.	Disediakan anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 15.620.000,- dan Realisasi keuangan Rp 8.877.000,- atau sebesar 56,831%. Realisasi tersebut tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Hal ini karena penggunaan anggaran BBM disesuaikan dengan kebutuhan dan mobilitas penggunaan kendaraan dinas. Sedangkan untuk belanja bahan kebersihan kantor pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor..	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan sebanyak 3 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 100% yaitu cetak, jilid dan penggandaan.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan II sebesar Rp 30.575.000 dan realisasi keuangan s.d TW II sebesar Rp.2.175.000 atau sebesar 7,11%.Tidak mencapai target karena Penggunaan anggaran untuk belanja cetak spanduk, stempel, banner dan baliho disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, target s.d triwulan triwulan I sebanyak 15 expl dan realisasi 15 expl yaitu koran lokal 9 expl, koran nasional 3 expl, koran regional 3 expl dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas triwulan I sebesar Rp 3.720.000,- dan realisasi keuangan Rp 3.350.000,- atau sebesar 90,05%. Realisasi keuangan tidak mencapai target 100% karena keterlambatan penyedia koran dalam melakukan penagihan sehingga memengaruhi realisasi keuangan.	Agar PPTK menghubungi penyedia untuk percepatan administrasi keuangan.
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dan target triwulan II sebanyak 64 org dan terealisasi 85 org dengan capaian kinerja 132,81%	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan II sebesar Rp 6.600.000 dan Realisasi keuangan s.d TW II sebesar Rp. 3.650.000 atau sebesar 55,30%. Terdapat SPJ sebesar Rp 3.750.000 yang belum di-GUkan. penggunaan anggaran disesuaikan dengan jumlah kunjungan tamu ke kantor.	Percepatan penyelesaian administrasi keuangan

1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target s.d triwulan II sebanyak 10 kali dan realisasi 5 kali, capaian kinerja 50%.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan II sebesar Rp 143.162.400,- dan realisasi keuangan Rp 101.601.210 atau sebesar 70,97%. Realisasi masih rendah karena terdapat SPJ sebesar Rp 10.530.000 yang belum diGUKan serta diterapkannya efisiensi untuk kegiatan perjalanan dinas. Penggunaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan surat/undangan kegiatan. Sedangkan untuk honor tenaga sopir disediakan untuk 2 org namun yang terealisasi hanya 1 org.	Percepatan pertanggungjawaban keuangan dan tetap melakukan efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas.
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah mebel yang diadakan sebanyak 5 unit dan realisasi 0%.	Disediakan anggaran kas triwulan II sebesar Rp. 13.450.000 dengan realisasi sebesar 0% ,masih dalam proses pengajuan nota dinas.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi dan percepatan realisasi belanja melalui e-catalog
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan sebanyak 4 unit dan realisasi sebesar 0%.	Disediakan anggaran kas triwulan II sebesar Rp. 44.360.000 dengan realisasi sebesar 0% masih dalam proses pengajuan nota dinas.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi dan percepatan realisasi belanja melalui e-catalog
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, dan target pertriwulan sebanyak 100 surat dan realisasi 76 surat dengan persentase capaian kinerja 76%. Capaian kinerja disesuaikan dengan jumlah surat yang dikeluarkan maupun yang diterima. dimana surat masuk sebanyak 22 surat dan surat keluar sebanyak 54 surat.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan II sebesar Rp 3.917.700,- dan Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp 500.000 atau sebesar 18.50 %. Realisasi yang masih rendah karena terdapat belanja E-catalog sebesar Rp. 2.205.681 yang belum di GU-kan.	Percepatan proses pengadaan belanja melalui e-catalog dan administrasi keuangan
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, dan target pertriwulan sebanyak 9 rekening dan realisasi 9 rekening yaitu Listrik BPBD 3 rek, Token Listrik 2 rek, Air kantor 3 rek, kartu halo 3 rek. Capaian kinerja sebesar 100%	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan II sebesar Rp 33.902.402,- Dan Realisasi keuangan Rp 24.431.070 atau 72.06%.Realisasi tidak sesuai dengan target karena terdapat SPJ Pembayaran Listrik, Air dan Telepon Kantor untuk bulan juni yang belum ter-Gukan sebesar Rp 5.227.694. Dan pada dasarnya penggunaan anggaran belanja bersifat Riil Cost	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan sebanyak 2 orang setiap triwulan. Sedangkan realisasi triwulan I sebanyak 2 org dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 12.780.000,- dan Realisasi keuangan Rp 8.290.000 atau 64,87%. Realisasi keuangan tidak mencapai target karena honor pejabat pengadaan di sesuaikan dengan SK yang berlaku bulan Maret 2025 dan belum ada proses pengadaan yang berjalan, demikian halnya dengan honor PPK e-Catalog.	PPTK mencermati realisasi keuangan untuk dilakukan perubahan anggaran.
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah			

1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator out put sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dengan target 14 unit setiap triwulan dan realisasi triwulan II sebanyak 8 unit yaitu kendaraan DD 8170 G, DD 8152 G, DD 6985 G, DP 6983 G, DP 6984 G, DP 6986 G, DP 6987 G, B 6212 TQE dengan capaian sebesar 57,14% .Capaian kurang dari target disebabkan karena pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan.	Disediakan anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 64.700.000,- dan Realisasi keuangan Rp. 27.407.500,- atau 42.36%. Realisasi keuangan yang masih rendah karena terdapat SPJ senilai Rp 12.180.000 yang belum ter-Gukan. Pada dasarnya anggaran yang digunakan disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi kendaraan dinas agar siap pakai dan segera merampungkan SPJ keuangan.
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target triwulan II sebanyak 11 unit dan terealisasi 6 unit yaitu 1 unit laptop, 3 unit printer, 2 unit komputer dengan persentase capaian kinerja 30%. Pemeliharaan peralatan disesuaikan dengan kondisi peralatan.	Disediakan anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 18.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.040.000 atau 22.38%. Dimana terdapat SPJ yang belum di GU kan sebesar Rp 1.970.000 yang kendala pada pengimputan pajak di aplikasi coretax. Pada dasarnya Penggunaan anggaran di dasarkan pada kondisi peralatan kantor yang dipelihara.	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi setiap triwulan sebanyak 1 dengan realisasi sebanyak 1 unit atau 100%. Pemeliharaan gedung kantor disesuaikan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.	Disediakan anggaran kas sampai dengan triwulan II sebesar Rp 15.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.992.000 atau 33,28%. Penggunaan anggaran di sesuaikan dengan kondisi gedung dan bangunan yang akan di pelihara.	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan.
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	01	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan dengan target 250 org. Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan II TA. 2025, kegiatan tersebut belum dilaksanakan karena rencana pada bulan April 2025 akan dilaksanakan bertepatan dengan ujian nasional tingkat SMP/SMA dan sasaran untuk sosialisasi adalah Pelajar Tingkat SMP/SMA.	Berdasarkan Anggaran Kas Tahun 2024 kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II sebesar Rp. 56.130.200,- realisasi keuangan Rp. 4.807.500,- (administrasi) realisasi 8,56%.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	01	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah warga negara termasuk golongan rentan di kawasan rawan bencana kab/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan target sebanyak 100 orang. Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan III TA. 2025	Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan III TA. 2025 (Bulan September 2025)	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranaan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan dengan target 35 unit. Adapun yang telah terealisasi 3 unit cainsauw sedangkan untuk belanja 32 unit pengadaan bahan-bahan lainnya masih dam proses pencarian spesifikasi barang di etalase E-Catalog.	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp. 153.550.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.435.000 atau 6.14%	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi

1	05	01	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk, dengan target sebanyak 4 desa kegiatan ini akan di laksanakan pada triwulan III TA. 2025	Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan III TA. 2025 (Bulan Juli 2025)	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat, dengan target sebanyak 50 orang, sub kegiatan ini akan direncanakan pada Triwulan II TA. 2025, kegiatan tersebut belum dilaksanakan dan masih tahap pengajuan nota dinas ke pimpinan	Berdasarkan Anggaran Kas Tahun 2025 kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II sebesar Rp. 38.144.500,- realisasi 0%.masih dalam proses pengajuan nota dinas dan rencana akan dilaksanakan minggu ke dua bulan juli 2025	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang ikut pelatihan dengan target 250 org, sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV TA. 2025	Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan IV TA. 2025 (Bulan November 2025)	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	05	01	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan januari s.d Juni 2025 sebanyak 294 jiwa (162 Laki-laki dan 132 Perempuan) dan semuanya terlayani bantuan logistik baik itu berupa sandang pangan dan hunian sementara (tenda) bagi yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan.	Disediakan anggaran triwulan II sebesar Rp 27.716.750- dengan realisasi sebesar Rp. 13,38%. Namun terdapat beberapa Spj Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang belum ter GU kan sebanyak Rp 5.326.000,- dan Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 1.300.000,-, jadi total Spj yang belum ter GU kan sebesar Rp. 6.626.000,-	PPTK segera melengkapi SPJ tersebut agar anggaran dapat terealisasi
1	05	01	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan januari s.d Juni 2025 sebanyak 294 jiwa (162 Laki-laki dan 132 Perempuan) dan semuanya terlayani bantuan logistik baik itu berupa sandang pangan dan hunian sementara (tenda) bagi yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan.	Disediakan anggaran triwulan II sebesar Rp 32.473.580,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.733.600,. Namun terdapat beberapa Spj yang belum ter GU kan yaitu Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah sebesar Rp. 4.418.000,- dan belanja bahan logistik pangan Rp .2.367.500,-	PPTK tetap membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan melakukan pemantauan kejadian bencana
1	05	01	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Output adalah Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa kooridnasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana pada bulan januari s.d Juni 2025 sebanyak 40 personil dan semuanya aktif dalam penanggulangan bencana	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 32.473.580,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.733.600,- Tidak terealisasi 100%, hal ini disebabkan karena anggaran sifatnya disediakan dan tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan aktivasi sistem komando penanganan darurat.	PPTK tetap membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan melakukan pemantauan kejadian bencana
1	05	01	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Indikator output adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa bencana non	Dan disediakan anggaran triwulan II sebesar Rp 3.364.400- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- hal ini disebabkan karena tidak ada kejadian akibat Covid 19 dan bencana wabah penyakit lainnya atau kejadian bencana akibat gagal teknologi.	PPTK merampungkan laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan

						alam yang ditangani oleh BPBD terkait giat pemulasaran jenazah covid-19, semuanya direspon kurang dari 24 jam. pada periode Triwulan II tidak ada laporan Masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 (meninggal) atau akibat pandemi lain dan akibat gagal teknologi yang diterima oleh TRC BPBD.		
1	05	01	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Indikator output adalah Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan Januari s.d Juni 2025 sebanyak 294 jiwa (162 Laki-laki dan 132 Perempuan) dan semuanya terlayani bantuan logistik baik itu berupa sandang pangan dan hunian sementara (tenda) bagi yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan.	Disediakan anggaran triwulan II sebesar Rp 27.716.750- dengan realisasi sebesar Rp. 13,38%. Namun terdapat beberapa Spj Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang belum ter GU kan sebanyak Rp 5.326.000,- dan Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 1.300.000,-. jadi total Spj yang belum ter GU kan sebesar Rp. 6.626.000,-	PPTK segera melengkapi SPJ tersebut agar anggaran dapat terealisasi
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1	05	01	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Target output sub kegiatan pada triwulan II yaitu tersusunnya dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%	Terdapat SPJ belanja ATK sebesar Rp. 657.900,- Belanja kertas dan Cover sebesar Rp. 417.500,- Belanja Foto copy Sebesar Rp. 147.000,- yang belum di GU kan. Belanja Perjalanan Dinas Biasa terdapat realisasi sebesar 12,05%, sedangkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat disesuaikan dengan kegiatan. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa (Rekonstruksi Bangunan Pengaman Jembatan Desa Kawata Kec. Wasuponda) untuk pekerjaan fisik belum ada realisasi karena masih dalam proses identifikasi etalase calon penyedia, dan Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam (Rekonstruksi Tanggul Banjir Sungai Desa Lauwo Kec. Burau) masih proses riviuv kontrak di Bagian Hukum.	PPTK Mempercepat Realisasi Keuangan untuk belanja E-catalog serta melakukan koordinasi dengan ULP terkait Proses percepatan pengadaan barang dan jasa

3.4 Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Kinerja Sasaran OPD

Dalam pencapaian kinerja sasaran yang telah diperjanjikan oleh Kepala OPD, terdapat beberapa kebijakan strategis yang dilakukan pada Tahun 2025 yaitu :

1. Penetapan SK Bupati Luwu Timur Nomor : 421/F-01/XII/Tahun 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Angin Kencang, Banjir, Tanah Longsor, dan Abrasi di Kabupaten Luwu Timur. SK tersebut dibuat sebagai Upaya untuk mengantisipasi potensi kerawanan terjadinya bencana sesuai dengan analisa data prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dimana cuaca atau kondisi alam sangat ekstrim yang berpotensi terjadinya bencana alam Hidrometeorologi Basah, yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan harta benda, fasilitas umum dan fasilitas pemerintah.

2. Penetapan SK Bupati Luwu Timur Nomor 112/F-01/III/Tahun 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir. SK ini dibuat untuk mengakomodir kejadian banjir di Desa Alam Buana Kec. Tomoni Timur.
3. Penyebarluasan informasi kebencanaan melalui Media Sosial (Facebook, WAG, Instagram Pusdalops BPBD)
4. Penerapan Aplikasi SIAGA BENCANA untuk percepatan Pelayanan Pasca Bencana Penyaluran Dana BTT untuk korban bencana.
5. Pembentukan Group WA “PEDULI DESA” untuk mempermudah pelaporan kejadian bencana di Wilayah Kabupaten Luwu Timur, dimana group tersebut beranggotakan seluruh kepala desa dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi sebagai upaya untuk percepatan penanganan bencana sampai ditingkat desa.
6. Sosialisasi dan Advokasi Kebencanaan di 11 Kecamatan Se-Kab. Luwu Timur.

3.5 Pencapaian Kinerja mempengaruhi Budaya Kerja Organisasi

Budaya kerja merupakan bagian penting dalam suatu organisasi sebab suatu organisasi mungkin tidak akan berjalan baik, tanpa didasari dengan budaya kerja yang jelas. Oleh suatu organisasi, budaya kerja merupakan perihal wajib untuk dipertimbangkan sebab hal tersebut terkait dengan interaksi antara pegawai satu dengan yang lain. Hal tersebut pun berkontribusi besar akan kinerja dan kesuksesan suatu organisasi. Kuatnya budaya kerja nampak dari bagaimana pegawai memandang budaya kerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku yang digambarkan memiliki motivasi, dedikasi, kreativitas, kemampuan dan komitmen yang tinggi. Semakin kuat budaya kerja, semakin baik produktivitas yang dihasilkan pegawai. Dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan para aparatur negara.

Budaya Kerja merupakan suatu sikap mental yang selalu mencari perbaikan atau penyempurnaan apa yang telah dicapai. Sebagai abdi masyarakat posisi pegawai negeri sipil, sebagai mesin birokrasi dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka memaksimalkan fungsi organisasi pemerintah. Selain tuntutan diatas tanggungjawab yang lain adalah menjaga serta memperbaiki citra para pegawai dimata masyarakat, karena sering dianggap sebagai pegawai yang tidak memiliki inovasi kerja yang tinggi sehingga kinerja organisasi dinilai kurang optimal.

Pelaksanaan budaya kerja aparatur Negara dengan nilai-nilai yang seharusnya merupakan langkah awal yang sebaiknya dipilih dalam upaya melakukan Reformasi birokrasi secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi birokrasi yang efisien dan efektif dengan aparatur yang bersih, transparan, dan professional dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal Pencapaian kinerja sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memengaruhi budaya kerja organisasi, yang terlihat dari beberapa hal seperti motivasi, kepuasan kerja, dan kolaborasi antarpegawai:

- a. Sebagai contoh, untuk pencapaian target kinerja Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana dengan Indikator “Indeks Ketahanan Daerah (IKD)” target pada tahun 2025 adalah 0,66 dengan predikat sedang dan lebih tinggi dari target tahun sebelumnya. Dan untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kolaborasi, koordinasi, motivasi dan komitmen bersama. Dan ini menjadi tantangan bagi ASN BPBD dan OPD terkait untuk memenuhi target yang telah ditetapkan diawal tahun.
- b. Pencapaian target kinerja Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana dengan Indikator “Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana pada Triwulan II Tahun 2025 sudah mencapai 32,73%. Bilamana pengukuran capaian SPM hanya berdasarkan anggaran yang tersedia melalui DPA-SKPD BPBD TA. 2025, maka sangat berat untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun dengan upaya maksimal yang dilakukan oleh BPBD untuk berkoordinasi lintas sektoral dan berkolaborasi maka SPM tersebut dapat terpenuhi.

c. Hubungan Budaya Kerja “BERAKHLAK” terhadap pencapaian kinerja yaitu :

➤ **Berorientasi Pelayanan**

Berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memahami dan memenuhi kebutuhan Masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemberian bantuan logistik untuk korban bencana dan hal ini juga berkaitan dengan Tupoksi BPBD.

➤ **Akuntabel**

Mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya penyalahgunaan

kewenangan jabatan, menolak bentuk gratifikasi dalam melakukan pelayanan kemanusiaan untuk korban bencana. Membantu korban bencana dengan Ikhlas dan penuh tanggungjawab.

➤ **Kompeten**

Meningkatkan diri dengan terus belajar. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan yang telah dilaksanakan misalnya peningkatan kapasitas bagi TRC-BPBD, keikutsertaan dalam berbagai diklat teknis kebencanaan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial bagi Tim penanggulangan bencana.

➤ **Harmonis**

ASN menghargai setiap orang, menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini dapat terlihat dari pelayanan kemanusiaan yang diberikan untuk menolong korban bencana. Hal lainnya adalah berinteraksi dengan rekan kerja, atasan dan bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika terbukti dalam pelaksanaan Rapat Monev Internal lingkup OPD.

➤ **Loyal**

Berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Hal ini dapat terlihat dari perilaku bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi/OPD.

➤ **Adaptif**

ASN cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, mengembangkan inovasi dan kreatifitas, serta proaktif. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pengembangan Inovasi di BPBD seperti Penerapan Aplikasi SIAGA Bencana, PEDULI DESA yang merupakan upaya untuk percepatan penanganan bencana di Kabupaten Luwu Timur.

➤ **Kolaboratif**

Saling bersinergi dan bekerja sama, terlihat dengan adanya keterlibatan OPD terkait, Instansi Vertikal, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana. Ini berarti bahwa memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur. Hal lainnya adalah melakukan Kerjasama melalui Perjanjian Kerjasama lintas OPD terkait dan Vertikal dalam penanganan bencana, misalnya Kerjasama BPBD dengan BMKG Wilayah IV Makassar tentang Pemanfaatan Informasi di Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam Rangka

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Timur. Kerjasama BPBD dengan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan untuk pemenuhan Cadangan pangan untuk korban bencana dsb

BAB 4

PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada Triwulan II Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran belanja APBD Triwulan II Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 1.559.984.563,- (19,23%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1.004.862.382,- (64,41%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 545.687.180,- (34,98%), Belanja Hibah Rp 0,- (0%) serta Belanja Modal Rp 9.435.000,- (0,006%).
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis I dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Triwulan II Tahun 2025 sebesar **98,48%** dengan ***predikat BAIK***.
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis II yaitu Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Target Tahun 2025 sebesar **100%** dengan realisasi **32,73% *predikat KURANG***
- d. Persentase Capaian Kinerja sasaran III (sasaran pendukung) yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Triwulan II Tahun 2025 sebesar **94,29%**, dengan ***predikat BAIK***.
- e. Persentase Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana berdasarkan jenis pelayanan dasar yaitu :
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana : 58,67%
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : 0%
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : 29,52%

- Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap

perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi BPBD dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Madi, 14 April 2025

KEPAJARAN PELAKSANA,



ur. APRIL, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670707 200012 1 002

LAMPIRAN 1**TINDAK LANJUT LHE INSPEKTORAT TRIWULAN I TAHUN 2025*****Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah***

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Status/Progress Penyelesaian
1.	Belum semua pegawai menetapkan perencanaan kinerja (SKP)	Libatkan seluruh pegawai dalam menetapkan perencanaan kinerja sehingga semua pegawai peduli serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang direncanakan (SKP)	Telah dinformasikan kepada seluruh ASN untuk melakukan penginputan SKP. Dan telah dilakukan sosialisasi penginputan SKP kepada CPNS dan PPPK Lingkup BPBD. Dibuktikan dengan Dokumentasi dan SKP Triwulan II TA. 2025	Selesai
2.	Pengumpulan data kinerja dan capaian kinerja belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi)		Pengumpulan data dan capaian kinerja masih menggunakan aplikasi sederhana (Exel).	Selesai
3.	Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya hanya menginfokan satu tahun sebelumnya.	Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, upayakan menginfokan minimal tiga tahun sebelumnya	Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LAPKIN) telah menginformasikan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya, sedangkan untuk Laporan Kinerja Triwulanan hanya dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya. (LAPKIN Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Triwulan I TA. 2025).	Selesai

Malili, 07 Juli 2025

KEPALA PELAKSANA,



dr. APRIL, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670707 200012 1 002